

Analisis Pendekatan Diplomasi Ekonomi Tiongkok Dalam Konflik Timur Tengah

Diah Apriliani

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Al-Ghifari, Bandung Indonesia
E-mail: diah.apriliani17@gmail.com

Abstract

This research examines China's economic diplomacy approach in managing conflicts in the Middle East, focusing on Beijing's efforts to protect and secure commercial investments, economic assets, and tools in the region. Despite China officially adhering to the non-intervention principle, Beijing's economic diplomacy approach demonstrates greater flexibility and pragmatism. China's economic diplomacy in the Middle East involves leveraging diplomatic resources for necessary interventions to safeguard Chinese investments and assets. Additionally, Beijing utilizes economic incentives as a tool to support the achievement of specific foreign policy goals at vulnerable points in the region. The research employs a qualitative research method, utilizing literature review data collection through the internet. Data processing techniques include editing, classifying, verifying, and drawing conclusions. In addressing threats to security and stability in the Middle East, China also employs diplomatic and military resources to protect its citizens and investments, including evacuating Chinese nationals during crises and participating in conflict mediation. China's economic assistance, particularly through the Belt and Road Initiative (BRI), provides incentives for Middle Eastern countries to steer away from armed conflicts and enhance their economic development.

Keywords: Economic Diplomacy, China, Middle East, Conflict, Non-intervention

Abstrak

Penelitian ini mengulas pendekatan diplomasi ekonomi Tiongkok dalam mengelola konflik di Timur Tengah dengan fokus pada upaya Beijing dalam melindungi dan mengamankan investasi komersial, aset ekonomi, dan alat ekonomi di kawasan tersebut. Meskipun Tiongkok secara resmi menganut prinsip non-intervensi, pendekatan diplomasi ekonomi yang diterapkan oleh Beijing menunjukkan fleksibilitas dan pragmatisme yang lebih besar. Diplomasi ekonomi Tiongkok di Timur Tengah melibatkan pemanfaatan sumber daya diplomatik untuk intervensi yang dibutuhkan demi menjaga keamanan investasi dan aset Tiongkok. Selain itu, Beijing menggunakan insentif ekonomi sebagai alat untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan luar negeri yang spesifik di titik-titik rawan dalam kawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan melalui internet. Dan teknik pengolahan data meliputi, pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), dan pembuatan kesimpulan (concluding). Dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan dan stabilitas di Timur Tengah, Tiongkok juga menggunakan sumber daya diplomatik dan militer untuk melindungi warganya dan aset investasinya. Ini mencakup evakuasi warga negara Tiongkok selama krisis dan partisipasi dalam mediasi konflik. Bantuan ekonomi Tiongkok, terutama melalui BRI, memberikan insentif kepada negara-negara di Timur Tengah untuk menjauh dari konflik bersenjata dan meningkatkan pembangunan ekonomi mereka.

Kata kunci: Diplomasi Ekonomi, Tiongkok, Timur Tengah, konflik, non-intervensi

Pendahuluan

Abad ke-21 telah menyaksikan ekspansi drastis investasi luar negeri Tiongkok di Timur Tengah (Asia Barat), khususnya di bidang energi, proyek sumber daya alam, dan infrastruktur penggunaan ganda (yang melayani tujuan sipil dan militer). Dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI), Tiongkok membantu mendanai, mengoperasikan, dan membangun infrastruktur yang diperlukan di Timur Tengah, dan kawasan lainnya. Mereka berjanji membantu negara-negara Timur Tengah mengembangkan infrastruktur dan mengundang mereka untuk menjadi anggota pendiri *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB). Sepuluh negara di kawasan ini telah bergabung (Mesir, Israel, Iran, Yordania, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Turki dan Uni Emirat Arab), dan janji infrastruktur dan pembangunan telah masuk dalam perhitungan beberapa negara ketika mereka terlibat dengan Tiongkok dalam upaya perdamaian. Prinsip non-intervensi adalah salah satu pedoman kebijakan luar negeri dan keamanan utama Tiongkok di Timur Tengah. Secara tradisional, sikap Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terhadap kawasan ini, seperti halnya seluruh kawasan lain di dunia, didasarkan pada prinsip non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara-negara berdaulat lainnya (Shichor 2013). Beijing secara bertahap mengembangkan pendekatan kasus per kasus yang bijaksana dan pragmatis yang menggaris bawahi sejauh mana posisi dan kebijakannya mengenai non-intervensi, integritas teritorial, dan kedaulatan bersifat kondisional. Meskipun prinsip non-intervensi merupakan pedoman utama dalam kerja diplomatik Tiongkok dan merupakan alat retorika utama, selalu ada fleksibilitas dalam cara Beijing menjalankan kebijakan luar negeri dan keamanannya dalam hal non-intervensi (Chen 2016).

Secara khusus, Tiongkok tidak melibatkan diri dalam urusan dalam negeri negara-negara berdaulat lainnya kecuali kepentingan nasional atau ekonominya misalnya, keamanan perluasan kepentingannya di luar negeri, warga negara Tiongkok, dan pasokan energi berada dalam bahaya atau berisiko (Chaziza dan Goldman 2016). Terlebih lagi, Tiongkok telah memberikan perhatian lebih terhadap reputasi internasionalnya dalam upaya untuk memproyeksikan citra positif sebagai kekuatan besar atau pemangku kepentingan utama yang dapat diandalkan di kawasan. Hal ini memberikan Tiongkok profil regional yang lebih terlihat dan meningkatkan prestise nasional dan internasional (Potter 2013; Wang 2011). Walaupun Tiongkok sebelumnya meragukan operasi penjaga perdamaian di bawah naungan PBB, sikapnya berubah pada dekade 1980-an. Pada tahun 1990, pengamat Tiongkok pertama kali ikut serta dalam Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB di Timur Tengah. Sejak itu, Tiongkok telah terlibat dalam operasi penjaga perdamaian PBB di Lebanon dan menempatkan penasihat militer di Suriah (Oosterveld 2017). Armada Tiongkok juga ditempatkan di Teluk Aden untuk mendukung misi anti-pembajakan di Laut Arab. Lebih dari separuh pasukan penjaga perdamaian Tiongkok ditempatkan di Timur Tengah, khususnya melibatkan patroli di lepas pantai Somalia sebagai bagian dari kampanye anti-pembajakan yang ditugaskan oleh PBB (Aronson 2016). Selanjutnya, pada tahun 2016, Beijing membangun pangkalan angkatan laut luar negeri pertamanya di Djibouti, yang merupakan fasilitas pendukung kebutuhan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN). Menurut pemerintah Tiongkok, pangkalan di Djibouti terutama akan berfungsi sebagai pos istirahat dan relaksasi bagi lebih dari 2.400 tentara Tiongkok yang membantu misi anti-pembajakan, penjaga perdamaian PBB, dan penyelamatan kemanusiaan di wilayah tersebut (Fei 2017). Di sisi lain, pangkalan di Djibouti juga akan memberi Tiongkok pengalaman untuk membangun

lebih banyak pangkalan militer di luar negeri dan memperluas lingkup pengaruhnya di kawasan tersebut serta menyediakan batu loncatan maritim dan udara permanen untuk operasi mendalam di Afrika dan kawasan Samudera Hindia. (Singh 2015).

Diplomasi mediasi telah muncul sebagai salah satu pilar utama dari tujuan dan praktik kebijakan luar negeri Tiongkok, dimana Beijing dengan sengaja memposisikan dirinya sebagai pembawa perdamaian dalam konflik dan krisis Timur Tengah (misalnya Suriah, Yaman, Iran, Qatar, dan perdamaian Israel-Palestina). proses). Diplomat dan pemimpin Tiongkok telah terlibat dalam proposal diplomatik untuk memainkan peran mediasi dalam beberapa hal tersebut (Sun dan Zoubir 2018). Beijing juga berupaya memainkan peran yang lebih konstruktif dalam penyelesaian konflik di sana (misalnya krisis nuklir Iran dan perang saudara di Suriah) dengan memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara besar dan organisasi regional lainnya (Chaziza 2018). Penelitian diplomasi ekonomi Tiongkok Dalam Konflik Timur Tengah bertujuan untuk mengeksplorasi pertanyaan berikut: bagaimana Tiongkok menggunakan cara-cara diplomatik untuk melindungi kepentingan komersialnya dan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya di Timur Tengah? Studi ini berargumentasi bahwa meskipun Beijing menganut prinsip non-intervensi, diplomasi ekonomi Beijing memiliki pendekatan interpretatif yang lebih fleksibel dan pragmatis. Diplomasi ekonomi Tiongkok di Timur Tengah menggunakan sumber daya diplomatik di berbagai tingkat dan melakukan intervensi menggunakan berbagai pendekatan untuk mengejar dan melindungi investasi komersial dan aset ekonominya; pada saat yang sama, negara ini menggunakan alat ekonomi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya di zona konflik di kawasan.

Tinjauan Teoritis Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi sebagai tugas diplomatik yang bertujuan untuk mendukung sektor bisnis dan keuangan suatu negara melalui pemanfaatan sumber daya ekonomi, seperti penghargaan atau sanksi, guna mencapai tujuan kebijakan luar negeri tertentu (Neves, 2017, hal. 92). Okano-Heijmans (2011), sementara itu, menegaskan bahwa diplomasi ekonomi tidak dapat dipisahkan dari politik-ekonomi. Mendefinisikan diplomasi ekonomi sebagai praktik hubungan internasional yang melibatkan negosiasi internasional dengan menggunakan sarana politik. Baginya, diplomasi ekonomi memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memanfaatkan arena ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan stabilitas politik suatu negara (Okano-Heijmans, 2011, hal. 11).

Tetapi, dimensi politik dan ekonomi tidak dapat dikategorikan sesederhana itu dikarenakan arah dimensi suatu arah kebijakan diplomasi ekonomi dapat berbeda-beda berdasarkan negara pengirim kebijakan dan negara penerima (Apriliani, 2022).

Liberalisme

Liberalisme merupakan suatu filosofi tentang nilai dasar kebebasan individu, rasionalitas, moral, hak asasi manusia, kesempatan dan kesetaraan hak bagi semua individu. Liberalisme memiliki esensi utama, yaitu seperti perdamaian, kompromi, pengendalian diri, sikap tidak berlebihan. Liberalisme menolak adanya sentralisasi pada

aktor Hubungan Internasional hanya Pemerintah atau Negara saja, walaupun pada praktiknya keberadaan mereka pasti dibutuhkan pada proses Hubungan Internasional.

Liberalisme ekonomi adalah keyakinan bahwa Negara harus menjauhkan diri dari campur tangan ekonomi hingga individu yang berprestasi dalam pasar merasa bebas dalam mengatur dirinya sendiri. Dalam beberapa pemahaman yang ditawarkan oleh para ahli sebagai hal yang dapat membantu memberikan pengertian maka dalam hal ini teori liberalisme digunakan sebagai salah satu paham untuk melihat suatu fenomena yang ada. Salah satu teori liberal mengajukan argumen bahwa interdependensi ekonomi akan mencegah negara agar tidak menggunakan daya paksa dalam berinteraksi satu-sama lain karena perang akan merusak kemakmuran masing-masing. (M.Saeri, 2012)

Teori ini menganggap bahwa kebijakan luar negeri dan diplomasi terjadi penting dalam menjaga kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penelitian yang diberikan, teori liberal mungkin digunakan untuk menganalisis bagaimana negara-negara menghadapi isu global, seperti konflik Timur Tengah, dengan mempertimbangkan dampaknya pada ekonomi, politik, dan makhluk manusia.

Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional mirip dengan kepentingan masyarakat, namun pemerintah, sebagai perwakilan jutaan rakyat, diberikan kewenangan untuk merumuskan dan memperjuangkan kepentingan tersebut baik melalui kebijakan di tingkat domestik maupun internasional. Paul Seabury menjelaskan dalam tulisannya bahwa istilah "kepentingan nasional" terkait dengan berbagai aspirasi suatu bangsa yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain. Dengan kata lain, fenomena ini dapat dianggap sebagai konsep umum dari kepentingan nasional.

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar kekuatan, dimana kekuatan adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol negara terhadap negara lain.

Menurut Norman J. Padelford, kepentingan nasional adalah: *“Nations interest of a country is what a governmental leaders and in large degree also what its people consider at any time to be vital to their national independence, way of life, territorial security and economic welfare”*.

Sedangkan menurut Holsti menjelaskan bahwa kepentingan nasional sebagai salah satu faktor yang terpenting dan mendasar yang mendorong sebuah negara melakukan interaksi dengan aktor-aktor hubungan internasional. Hal-hal yang terkait dalam kepentingan nasional sering dilihat sebagai tujuan awal dari kebijakan luar negeri.

Metodelogi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui studi literatur yang berasal dari berbagai sumber terutama buku dan jurnal penelitian ilmiah mengenai topik terkait kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori/perspektif. Dengan demikian data yang berhasil dikumpulkan dapat

dipahami secara lengkap dan menyeluruh. Sesuai dengan masalah pada penelitian ini yang akan menyoroiti terkait masalah hubungan negara dengan negara lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yang mana studi kepustakaan itu sendiri adalah mencari referensi- referensi buku atau literatur sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, laporan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, dan data-data yang terdapat dalam *website* atau internet, yang dapat menunjang pembahasan penelitian.

3. Teknik Pengolahan Data

Di dalam metode pengolahan data dijelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Secara umum metode pengolahan data akan melalui beberapa tahap meliputi, pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), dan pembuatan kesimpulan (concluding).

Hasil Dan Pembahasan

1. Diplomasi Ekonomi Tiongkok

Diplomasi ekonomi Tiongkok melibatkan keseluruhan tindakan ekonomi dan keuangan, termasuk perdagangan, investasi, dan segala bentuk kerja sama ekonomi. Hal ini juga mencakup diplomasi negara dan militer, serta kebijakan apa pun yang mendorong keuntungan ekonomi, untuk mengakses sumber daya, pasar, modal, teknologi, atau tenaga kerja terampil demi keuntungan ekonomi Tiongkok (Heath 2016). Secara lebih luas, diplomasi ekonomi Tiongkok beroperasi dalam kerangka harapan jangka panjang Tiongkok dan visi Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk memulihkan kejayaan nasional Tiongkok yang hilang, konsisten dengan ‘impian Tiongkok’ yang memberikan konteks dan visi kepada Tiongkok (*Harian Cina* 2017). Pendekatan ini menyatakan bahwa alat dan aktivitas komersial dapat memenuhi tujuan dan sasaran diplomatik dan sebaliknya. Selain komitmen untuk mendukung peremajaan nasional, tujuan dan instrumen diplomasi ekonomi tetap fleksibel, bergantung pada kebutuhan situasi Tiongkok (Heath 2016).

2. Diplomasi Ekonomi Tiongkok Dalam Konflik Timur Tengah

Selama beberapa tahun terakhir, beberapa konflik dan krisis di Timur Tengah telah terkait dengan faktor geopolitik etnis, agama, dan sektarian, serta intervensi dari negara-negara besar di luar kawasan. Masalah-masalah ini telah menjadi fokus utama yang mempengaruhi keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut. Beijing, sebagai hasil dari perluasan kehadiran ekonominya di tingkat regional, telah dengan cermat memantau perkembangan di Timur Tengah, khususnya terkait dengan masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian dan risiko keamanan yang melekat pada wilayah tersebut. Meskipun demikian, dengan berpegang teguh pada kebijakan non-intervensi yang telah diterapkan dalam jangka panjang, Tiongkok menghindari terlibat secara langsung dan memilih untuk tidak mengambil posisi yang jelas dalam isu-isu yang kontroversial.

Kepentingan utama Tiongkok di Timur Tengah melibatkan memastikan akses berkelanjutan terhadap sumber daya energi di wilayah tersebut, yang memiliki dampak signifikan pada perekonomiannya dan membuatnya rentan terhadap ketidakstabilan politik. Sebagian besar impor minyaknya, sekitar setengahnya, dan sepertiga dari impor

gas alam berasal dari Timur Tengah, terutama dari negara-negara Teluk (Workman 2018). Kemitraan energi antara Tiongkok dan Timur Tengah melibatkan berbagai proyek, termasuk proyek petrokimia dan gas alam di wilayah tersebut, serta proyek kilang minyak di Tiongkok sendiri.

Selain sektor energi, aktivitas komersial dan aspirasi Beijing di wilayah ini melibatkan peluang investasi dan kontrak proyek infrastruktur bagi perusahaan Tiongkok. Timur Tengah menjadi pasar yang signifikan untuk produk-produk Tiongkok, menjadikannya sumber impor terbesar di kawasan tersebut. Pada tahun 2016, nilai perdagangan bilateral antara Tiongkok dan negara-negara di Timur Tengah mencapai \$228,39 miliar (Gong 2017). Dengan posisinya yang strategis sebagai jalur darat dan laut menuju Eropa dan Afrika, Timur Tengah memiliki peran kunci dalam jalur perdagangan antara Timur dan Barat, yang sejalan dengan jaringan internasional Tiongkok yang diperluas melalui Inisiatif Belt and Road (BRI). Untuk memastikan akses yang dapat diandalkan bagi pelayaran komersial Tiongkok, Beijing telah melakukan investasi signifikan dalam pembangunan infrastruktur maritim regional dan jalur kereta api yang bertujuan menghubungkan Tiongkok dengan Eropa melalui Asia dan Timur Tengah (Qian 2016).

Selanjutnya, Tiongkok telah mengembangkan hubungan diplomatik dan menjaga kerjasama persahabatan dengan setiap negara di Timur Tengah. Hal ini memungkinkan Beijing untuk membangun pengaruhnya dengan kekuatan regional seperti Arab Saudi, Iran, Israel, dan Mesir, yang berada di luar wilayah terdekatnya di Asia-Pasifik. Pada akhirnya, Tiongkok memiliki kepentingan umum di Timur Tengah, serupa dengan di wilayah lain, yaitu untuk diakui sebagai kekuatan besar yang sah dan dapat diandalkan (Calabrese 2017). Oleh karena itu, berbagai kepentingan Tiongkok di Timur Tengah menuntut komitmen yang lebih kuat terhadap keamanan dan stabilitas politik di kawasan tersebut.

Di daerah konflik di mana Tiongkok memiliki keberadaan yang substansial dalam bentuk aset, investasi, perusahaan, atau warga negara, terkadang Tiongkok merasa perlu untuk turut campur dalam urusan lokal, walaupun ini bertentangan dengan prinsip non-intervensi yang telah lama dipegang teguh. Meskipun dalam sejarahnya Tiongkok cenderung memainkan peran keamanan atau diplomatik yang terbatas di Timur Tengah, kebijakan non-intervensi Tiongkok di kawasan tersebut, seperti di tempat lain, lebih fleksibel, pragmatis, dan bersifat eksperimental daripada gambaran yang sering diberikan. Dengan meningkatnya paparan terhadap berbagai ancaman ini, Tiongkok mendapati kebutuhan mendesak untuk mengembangkan dan menggunakan dengan cermat alat diplomatik dan militer guna menanggapi ancaman-ancaman tersebut. Beijing semakin aktif di ranah diplomasi, terutama melalui lembaga multilateral seperti Liga Arab dan Forum Teluk Tiongkok, dan dalam upayanya merekrut negara-negara Timur Tengah untuk bergabung sebagai anggota AIIB (Calabrese 2017).

Oleh karena itu, partisipasi Tiongkok dalam upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah tidaklah bersifat opsional, melainkan muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan kekuatan yang tengah bangkit, yang berusaha bersaing dengan Amerika Serikat di berbagai bidang. Tiongkok secara konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui jalur negosiasi dan dialog (solusi politik) serta dengan tekad penuh mendukung perdamaian, kerja sama, dan pembangunan ekonomi dalam kerangka Inisiatif Belt and Road (BRI) (Gong 2017). Keterlibatan Tiongkok melibatkan berbagai tindakan, termasuk memberikan kontribusi pada pasukan penjaga perdamaian PBB (seperti di Lebanon),

memberikan dukungan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB (seperti dalam krisis nuklir Iran), bertindak sebagai mediator antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik (seperti antara pemerintah Suriah dan kelompok oposisi), menunjuk utusan khusus (seperti dalam krisis Suriah dengan utusan khusus Tiongkok untuk urusan Timur Tengah), atau menjadi tuan rumah dialog tingkat tinggi (Djallil 2011; Middle East Observer 2016; Kementerian Luar Negeri, Republik Rakyat Tiongkok 2013; Kementerian Pertahanan Nasional Republik Rakyat Tiongkok 2017; Reuters 2016).

3. Aspek dari diplomasi ekonomi Tiongkok dalam konflik Timur Tengah

Diplomasi ekonomi Tiongkok selama konflik Timur Tengah mencakup penggunaan kekuatan politik dan hubungan bilateral untuk memengaruhi kebijakan perdagangan dan keamanan. Tiongkok memiliki kepentingan ekonomi di wilayah Timur Tengah, yang ditunjukkan dengan upaya mereka untuk menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara di wilayah tersebut. Beberapa elemen penting dari diplomasi ekonomi Tiongkok dalam konflik Timur Tengah adalah sebagai berikut:

- Pengaruh politik dan hubungan bilateral: Tiongkok memengaruhi kebijakan perdagangan dan keamanan melalui pengaruh politik dan hubungan bilateral dengan negara-negara di kawasan tersebut;
- Inisiatif Belt and Road (OBOR): Strategi ini memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan ekonomi di negara-negara di kawasan Timur Tengah, dan China secara aktif berpartisipasi dalam pembentukan hub baru di kawasan tersebut.
- Konflik Koordinasi: Tiongkok mencoba berperan sebagai penengah dalam konflik di Timur Tengah dengan membantu membuat perjanjian dan menyelesaikan konflik antara negara-negara di wilayah tersebut.
- Pertimbangan geopolitik: Selama beberapa dekade terakhir, Tiongkok telah menghadapi tantangan geopolitik di Timur Tengah. Kawasan tersebut telah mendapat perhatian yang lebih besar di bawah kepemimpinan Xi Jinping, melampaui kepentingan ekonomi murni.

Selain itu, diplomasi ekonomi Tiongkok dalam mendukung tujuan kebijakan luar negerinya mencakup empat langkah diplomatik yang diidentifikasi sebagai berikut :

a. Melindungi Warga Dan Investasi

Krisis dan konflik di Timur Tengah memicu kesadaran Beijing akan kebutuhan untuk turut campur tangan dalam konflik lokal demi melindungi warganya dan aset investasinya di luar negeri. Tingkat kompleksitas konflik sektarian di Yaman, yang membawa potensi risiko terhadap investasi ekonomi Beijing dan keselamatan warga Tiongkok di wilayah tersebut, tercermin sepenuhnya dalam strategi kebijakan non-intervensi Tiongkok yang bertujuan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang telah disebutkan.

Menurut Kementerian Perdagangan Tiongkok, Beijing memiliki 14 perusahaan dan 460 personel di Yaman, dengan proyek perdagangan di bidang ekstraksi minyak, telekomunikasi, konstruksi, jalan dan jembatan, serta perikanan (Lee 2015). Selain itu,

Yaman mengekspor sekitar 1,4–1,5 juta barel minyak mentah Masila setiap bulannya, terutama ke Tiongkok. Meskipun volumenya relatif kecil, impor minyak mentah Tiongkok dari Yaman dibandingkan dengan tahun 2014 meningkat sebesar 315 persen dalam dua bulan pertama tahun 2015 (Reuters 2015a). Selain itu, intensifikasi perang sektarian di Yaman pada akhirnya dapat mengancam pemasok minyak utama Tiongkok di Timur Tengah (Iran dan Arab Saudi). Selain itu, BRI telah menambahkan dimensi ekonomi dan strategis lebih lanjut sejak BRI melewati Selat Bab al-Mandab, yang dikuasai Yaman, ke Laut Merah. Perang saudara di Yaman dapat mengakibatkan terhambatnya transportasi jalur air di Teluk Aden atau blokade Selat Bab al-Mandab. Lokasi geografis Yaman menjadikannya penting bagi BRI Tiongkok dan keamanan energinya. Hal ini mencakup kedekatan Yaman dengan Tanduk Afrika, tempat Beijing memiliki jejak ekonomi yang besar, dan lokasinya di Teluk Aden, yang menjadikannya lokasi strategis untuk Terusan Suez (Taylor 2015). Menurut Administrasi Informasi Energi AS (EIA), 3,8 juta barel minyak dan produk olahan minyak melewati Selat Bab al-Mandeb setiap hari dalam perjalanan ke Eropa, Asia, dan Amerika Serikat, menjadikannya titik kemacetan tersibuk keempat di dunia. (Rosen 2015).

Karena Timur Tengah adalah wilayah yang paling diperebutkan, ditantang oleh perang, krisis, konflik, dan organisasi jihad ekstremis, hal ini menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan investasi energi Tiongkok dan keselamatan warga negara Tiongkok. Warga negara Tiongkok sering kali berada dalam situasi bahaya akibat krisis atau ketidakstabilan di negara tuan rumah. Oleh karena itu, pemerintah Tiongkok semakin terlibat dalam mengelola operasi evakuasi non-tempur di seluruh Timur Tengah. Misalnya, selama pemberontakan Musim Semi Arab, Tiongkok menyelamatkan 1.800 warganya dari Mesir dan 2.000 dari Suriah (Duchatel, Brauner dan Zhou 2014).

Tiongkok juga secara aktif melakukan mediasi antara perwakilan pemerintah dan oposisi (misalnya di Suriah atau Yaman) untuk melindungi warga negara dan asetnya di zona konflik (Lee 2015; Xinhua 2017c). Diplomasi ekonomi Tiongkok tertarik untuk terus memajukan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan pemerintah negara tuan rumah, sekaligus terlibat secara paralel dengan kelompok oposisi dan pemberontak. Pendekatan ini dapat memfasilitasi Tiongkok menciptakan lingkungan politik yang stabil bagi warga negara dan aset-asetnya, sekaligus membantu melindungi diri dari ketidakpastian akibat pergantian rezim dan mengidentifikasi kapan wilayah-wilayah tertentu di suatu negara berada di bawah kendali de facto kekuatan oposisi seperti Kurdi atau Taliban (Ramani 2017).

b. Pembangunan dan Bantuan Ekonomi

Tiongkok berada dalam posisi unik karena mampu menawarkan insentif kepada pihak-pihak yang berkonflik di Timur Tengah dalam bentuk paket pembangunan ekonomi yang substansial dan bantuan ekonomi/kemanusiaan untuk menjauhkan mereka dari konflik bersenjata. Dengan sumber daya ekonomi, bank komersial, dan perusahaan milik negara yang dimilikinya, Tiongkok menjadi lebih terampil dalam menggunakan instrumen ekonomi untuk mendukung upaya diplomatiknya dalam menyelesaikan konflik, sehingga menjadikannya sebagai pintu masuk bagi semua pemain utama di arena internasional dan regional (Yang 2017).

Insentif ekonomi ini dapat memberikan dampak transformatif di bidang politik, ekonomi dan sosial di Timur Tengah di masa depan. Presiden Tiongkok Xi Jinping, dalam

pidatonya di hadapan Liga Arab di Kairo pada bulan Januari 2016, menyatakan prinsip-prinsip panduan untuk bersama-sama membangun BRI dengan Timur Tengah dan menekankan bahwa Beijing harus menjadi 'pembangun perdamaian regional, penggerak pembangunan, pendorong perdamaian, industrialisasi, pendukung stabilitas, dan mitra pertukaran antar masyarakat di Timur Tengah'. Menurut Presiden Xi, gejolak di Timur Tengah berasal dari terhentinya pembangunan ekonomi sehingga solusi akhir mungkin bergantung pada pembangunan ekonomi lebih lanjut (*Harian Cina* 2016).

Beijing telah melakukan investasi ekonomi yang substansial di berbagai negara di Timur Tengah, melebihi Uni Eropa, Rusia, dan Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama dalam beberapa negara (Oosterveld 2017). Sebagai contoh, Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar Arab Saudi pada tahun 2016 dengan nilai mencapai \$42,3 miliar, menjadikan Arab Saudi sebagai pemasok minyak mentah terbesar dan mitra dagang utama di Asia Barat bagi Tiongkok (Xia dan Wang 2017). Pada tahun 2017, saat kunjungan Presiden Tiongkok ke Arab Saudi, ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) mengenai kapasitas produksi dan investasi yang mencakup 35 proyek dengan nilai mencapai \$65 miliar (An 2017). Selain itu, perusahaan minyak milik negara Tiongkok, seperti PetroChina dan Sinopec, telah mengekspresikan minat mereka untuk langsung membeli 5 persen saham Saudi Aramco, suatu kesepakatan yang potensial menghasilkan nilai sekitar \$100 miliar (El Gamal dan Lawler 2017).

Peluncuran lebih lanjut BRI Tiongkok diharapkan akan semakin meningkatkan investasi Tiongkok dan hubungan ekonomi dengan Timur Tengah, yang merupakan penghubung penting dalam implementasi dan keberhasilan BRI. Selama kunjungannya ke sana pada bulan Januari 2017, Presiden Xi menjanjikan investasi dan pinjaman sebesar \$55 miliar, termasuk pembentukan dana investasi bersama senilai \$20 miliar untuk UEA dan Qatar, dan menandatangani kesepakatan senilai \$15 miliar dengan Mesir (Nasional 2016). Selain itu, pada kunjungannya ke Teheran pada bulan Januari 2016, Presiden Tiongkok dan Presiden Iran menyetujui program 10 tahun untuk meningkatkan perdagangan bilateral Tiongkok-Iran hingga \$600 miliar (Chu dan Shen 2018).

Tiongkok juga memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara yang terlibat dalam konflik dan krisis kemanusiaan seperti Palestina, Suriah, Yaman, dan wilayah lain yang terdampak (Xinhua 2015, 2017a). Pada pertemuan tingkat menteri Forum Kerja Sama Tiongkok-Negara Arab yang kedelapan di Beijing, Presiden Xi berkomitmen untuk memberikan pinjaman senilai \$20 miliar untuk mendukung rekonstruksi ekonomi negara-negara Arab. Tiongkok juga berjanji memberikan bantuan lebih dari \$15 juta kepada Palestina sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan ini, serta memberikan negara-negara Arab bantuan ekonomi sebesar lebih dari \$23 miliar dalam bentuk kredit, pinjaman, dan bantuan kemanusiaan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Selain itu, Suriah, Yaman, Yordania, dan Lebanon dijanjikan bantuan kemanusiaan senilai \$91 juta (Zhou 2018).

Dalam diplomasi ekonominya, Tiongkok menggunakan strategi pembangunan ekonomi dan bantuan kemanusiaan untuk melindungi serta mengejar investasi komersial dan aset ekonominya. Tujuan utamanya adalah membangun citra Tiongkok sebagai kekuatan yang bertanggung jawab, berupaya meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi melalui kerja sama.

c. Membangun Infrastruktur di Timur Tengah

Perekonomian Tiongkok masih sangat bergantung pada minyak Timur Tengah, maka penting untuk melindungi infrastruktur BRI dan jalur komunikasi laut utama (SLOCs), serta meningkatkan kehadiran militernya di Timur Tengah untuk menciptakan koridor guna mengamankan kepentingan ekonominya. sepanjang pesisir yang membentang sampai ke pasar Afrika dan Eropa. Oleh karena itu, diplomasi ekonomi Tiongkok di Timur Tengah mendorong investasi besar dalam pembangunan dan pengoperasian infrastruktur yang mempunyai fungsi ganda, misalnya pelabuhan, kereta api, dan lain-lain, yang dapat melayani tujuan sipil dan militer.

Perusahaan-perusahaan Tiongkok memenangkan kontrak untuk proyek-proyek teknik, konstruksi, dan pembangunan infrastruktur di kawasan ini, seperti Klaster Industri Saudi-Tiongkok (Jizan), Taman Industri Tiongkok-Oman di Duqm, Zona Demonstrasi Kapasitas Produksi Tiongkok-UEA, dan Tiongkok- Zona Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Suez Mesir (Xinhua 2017b). Dengan berpartisipasi dalam proyek-proyek ekonomi ini, Tiongkok berharap dapat memajukan kepentingan ekonomi serta mencapai tujuan strategis dan keamanan. Beijing sedang membangun dan mengoperasikan infrastruktur penggunaan ganda (misalnya jalan raya, terowongan, pelabuhan, dan kereta api) dengan titik konektivitas penting di sepanjang jalur laut dari Laut Cina Selatan dan Samudera Hindia hingga Timur Tengah dan Afrika untuk melindungi kepentingan energi Tiongkok. Hal ini baru-baru terlihat pada MSRI Tiongkok yang menggunakan Timur Tengah sebagai jembatan ekonomi penting bagi Eropa dan Asia. Sudah menjadi praktik umum bahwa Tiongkok pertama-tama mengamankan kepemilikan komersial atas pelabuhan perdagangan strategis dan kemudian mengubahnya menjadi penggunaan militer atau penggunaan ganda, seperti yang dilakukan Tiongkok terhadap Gwadar di Pakistan, Piraeus di Yunani, Kolombo di Sri Lanka, dan Djibouti di Tanduk Afrika. Izzadeen 2017).

Tiongkok juga menunjukkan minatnya untuk melakukan investasi dalam proyek jalur kereta api yang menghubungkan Laut Merah dengan Mediterania, yang dikenal sebagai kereta api 'Red-Med.' Proyek ini dianggap sebagai rute alternatif atau pelengkap untuk Terusan Suez (Hindy 2017). Pada bulan Februari 2016, kereta kargo pertama dari Tiongkok tiba di Teheran sebagai bagian dari inisiatif Tiongkok untuk menghidupkan kembali Jalur Sutra kuno yang pernah digunakan oleh para pedagang untuk berdagang antara Eropa dan Asia Timur (Xinhua 2016). Infrastruktur yang melibatkan jalan raya, terowongan, pelabuhan, dan jalur kereta api di Israel dianggap memiliki nilai komersial signifikan, terutama untuk mendukung armada perdagangan besar Tiongkok. Inisiatif ini sejalan dengan upaya Beijing untuk membangun jaringan hubungan ekonomi yang menghubungkan Tiongkok dengan wilayah Asia Tengah, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Meskipun demikian, sebagian besar dana yang dialokasikan juga dapat berkontribusi pada peningkatan operasi proyeksi kekuatan oleh Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) di kawasan tersebut.

Peran Mesir juga menjadi krusial bagi Belt and Road Initiative (BRI) karena posisinya yang strategis sebagai penghubung antara Afrika dan Asia, serta sebagai gerbang Asia ke dunia Arab, dan gerbang Afrika ke Eropa melalui Mediterania. Perusahaan pelayaran milik negara Tiongkok telah melakukan investasi besar di pelabuhan sepanjang Koridor Terusan Suez, mulai dari Teluk Suez hingga Port Said. Pada tahun 2005, Hutchison Port Holdings, perusahaan yang dimiliki oleh Tiongkok, mengakuisisi 50 persen saham dalam usaha patungan dengan Otoritas Pelabuhan

Alexandria. Usaha patungan tersebut bertujuan untuk membangun, mengoperasikan, dan mengelola dua terminal peti kemas di pelabuhan Alexandria dan El Dekheila di pesisir utara Mesir (Eran 2016). Chinese Harbour State Company (CHEC) telah mengalokasikan dana sebesar \$219 juta untuk konstruksi dermaga selama 1.200 meter di Pelabuhan Timur Port Said dan pelabuhan al-Adabiya di ujung selatan Terusan Suez (Scott 2014). Selain itu, Tiongkok juga merupakan salah satu investor asing terkemuka di Zona Ekonomi Khusus Suez Canal (SCZone), dengan 86 perusahaan Tiongkok yang secara total menginvestasikan lebih dari \$1,1 miliar di wilayah tersebut (Arab Finance 2017).

Dalam konteks yang tidak melibatkan konflik militer, proyek infrastruktur dual-use yang dilakukan oleh Tiongkok di Mesir memiliki potensi untuk digunakan dalam mendukung logistik militer. Tiongkok dapat memanfaatkan jaringan fasilitas militer dan infrastruktur dual-use yang telah dibangunnya di wilayah tersebut untuk mendukung peningkatan kehadiran militer di Afrika serta untuk membentuk lingkungan keamanan di sekitar Laut Mediterania. Hal ini memiliki potensi untuk merugikan Amerika Serikat dan kepentingan sekutunya.

Kesimpulan

Abad ke-21 menyaksikan ekspansi drastis investasi luar negeri Tiongkok di Timur Tengah, terutama dalam bidang energi, proyek sumber daya alam, dan infrastruktur penggunaan ganda melalui Belt and Road Initiative (BRI). Tiongkok membantu mendanai, mengoperasikan, dan membangun infrastruktur yang diperlukan di kawasan ini, memperkuat hubungan ekonomi dan politiknya dengan negara-negara Timur Tengah. Prinsip non-intervensi menjadi pedoman kebijakan luar negeri Tiongkok di Timur Tengah, walaupun ada fleksibilitas dalam penerapannya. Tiongkok cenderung tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara-negara lain, kecuali dalam keadaan yang mempengaruhi keamanan nasional, warga negara Tiongkok, atau pasokan energi. Diplomasi ekonomi Tiongkok memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Tiongkok menggunakan berbagai pendekatan diplomatik dan ekonomi, termasuk mediasi konflik, pembangunan ekonomi, dan investasi dalam infrastruktur, untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya dan melindungi kepentingan komersialnya.

Partisipasi Tiongkok dalam operasi penjaga perdamaian PBB di Timur Tengah, pendirian pangkalan angkatan laut di Djibouti, dan diplomasi mediasi menunjukkan pergeseran dalam pendekatan keamanan Tiongkok di kawasan tersebut. Dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan dan stabilitas di Timur Tengah, Tiongkok juga menggunakan sumber daya diplomatik dan militer untuk melindungi warganya dan aset investasinya. Ini mencakup evakuasi warga negara Tiongkok selama krisis dan partisipasi dalam mediasi konflik. Bantuan ekonomi Tiongkok, terutama melalui BRI, memberikan insentif kepada negara-negara di Timur Tengah untuk menjauh dari konflik bersenjata dan meningkatkan pembangunan ekonomi mereka. Hal ini mencerminkan upaya Tiongkok untuk memainkan peran sebagai kekuatan yang bertanggung jawab dan membangun citra positif di kawasan tersebut. Dengan mengembangkan hubungan ekonomi dan politik yang kuat, Tiongkok berusaha untuk diakui sebagai kekuatan besar yang dapat diandalkan di Timur Tengah, sekaligus melindungi kepentingan energinya dan memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut.

References

- Almond, Roncevert Ganan. 2016. 'Kesepakatan Nuklir Tiongkok dan Iran'. *Diplomat*, 8 Maret, <https://thediplomat.com/2016/03/china-and-the-iran-nuclear-deal/>
- Alterman, B. Jon dan W. John Garver. 2008. *Segitiga Vital: Tiongkok, Amerika Serikat, dan Timur Tengah*. Washington, DC: Pers CSIS.
- Seorang Baijie. 2017. 'Tiongkok, Arab Saudi Mempererat Hubungan'. *Harian Cina*, 17 Maret, http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-03/17/content_28586508.htm
- Keuangan Arab. 2017. 'Video: Chinese Investment Boosts Suez Canal Economic Zone', 26 Maret, <http://www.arabfinance.com/en/videos/details/videos/>
- Apriliani, D., Hidayat, T., & Akim, A. (2022). Indonesian Commercial Diplomacy to Japan through the Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) in the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. *International Journal of Nusantara Islam*, 10(1), 25-33.
- Aronson, Geoffrey. 2016. 'Visi Tiongkok tentang Timur Tengah'. Al Jazeera, 21 Januari, <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/01/china-vision-middle-east-160121052018955.html>
- Berita BBC. 2014. 'China Akan Menggandakan Investasi Iran'. BBC News, 16 November, <http://www.bbc.com/news/business-30075807> (diakses pada 26 Desember 2018).
- . 2015. 'Krisis Yaman: Tiongkok Mengevakuasi Warga Negara dan Orang Asing dari Aden', 3 April, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32173811>
- Calabrese, John. 2017. 'China's Role in Post-Hegemonic Middle East', Middle East Institute, 1 Mei, <http://www.mei.edu/content/article/chinas-role-post-hegemonic-middle-east?print>
- Chaziza, Mordechai. 2018 'Upaya Mediasi Tiongkok di Timur Tengah dan Afrika Utara: Manajemen Konflik Konstruktif', *Analisis Strategis*, Vol.42, No.1, Maret, 29–41.
- Chaziza, Mordechai dan S. Ogen Goldman. 2016 'Faktor-Faktor Apa yang Meningkatkan Kemungkinan Intervensi Tiongkok dalam Perang Intranegara?', *Jurnal Ilmu Politik Asia*, Jil. 24, No. 1, Februari, 1–20.
- Chen Aizhu. 2010. 'Eksklusif: Tiongkok Memperlambat Pekerjaan Minyak Iran saat Ikatan Energi AS Menghangat', Reuters, 28 Oktober,

<https://www.reuters.com/article/us-china-iran-oil/exclusive-china-slows-iran-oil-work-as-u-s-energies-warm-idUSTRE69R1L120101028>

Chen Aizhu dan Chris Buckley. 2011. 'Exclusive: China Curbs Iran Energy Work', Reuters, 2 September, <https://www.reuters.com/article/us-china-iran-usa/exclusive-china-curbs-iran-energy-workidUSTRE78112K20110902>

Chen, Zheng. 2016. 'Tiongkok Memperdebatkan Prinsip Non-Intervensi', *Jurnal Politik Internasional Tiongkok*, Jil.9, No.9, September, 349–74.

Harian Cina. 2016. 'Pidato Presiden Xi di Markas Besar Liga Arab: Teks Lengkap', 21 Januari, http://www.chinadaily.com.cn/world/2016xivisitmiddleeast/2016-01/22/content_23191229.htm

Tim Dunne. 2001. "Liberalism". Dalam John Baylis & Steve Smith, *The Globalization of WorldPolitics*, 2 nd Edition (Oxford: Oxford University Press). Hal. 164.

<https://news.detik.com/kolom/d-3142307/membaca-kebijakan-luar-negeri-tiongkok-di-timur-tengah>

<https://www.dw.com/id/pengaruh-cina-di-timur-tengah-meningkat/a-65003091>

<https://news.detik.com/kolom/d-3142307/membaca-kebijakan-luar-negeri-tiongkok-di-timur-tengah>

<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/30150/H.%20BAB%20IV.pdf?isAllowed=y&sequence=8>